
D. FISIK PRASARANA DAERAH

Aspek fisik prasarana daerah sebagai penopang kegiatan pembangunan daerah diantaranya meliputi deskripsi dan statistik prasarana dan sarana sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang meliputi tata ruang, transportasi dan perhubungan, telekomunikasi dan informasi, pengairan, drainase, air bersih, air limbah, energi dan lainnya termasuk tingkat pelayanan pemerintah daerah bidang prasarana dan sarana berikut kebijakan pengembangannya.

Usaha pembangunan daerah Kapuas Hulu tidak dapat dilepaskan dari daya dukung dan potensi pengembangan dan sistem tata ruang wilayahnya. Sistem transportasi dan perhubungan, telekomunikasi dan informasi, sistem pelayanan air bersih serta sistem pelayanan energi listrik merupakan sistem prasarana wilayah sangat penting untuk menunjang usaha pengembangan wilayah Kapuas Hulu terutama dalam pengembangan sektor sosial ekonomi baik dalam sistem kehidupan sosial, produksi maupun perdagangan (lokal, antar pulau dan internasional).

D.1. SISTEM TATA RUANG WILAYAH

Kedudukan dan fungsi Kabupaten Kapuas Hulu dalam konteks struktur tata ruang Propinsi Kalimantan Barat dapat ditinjau dari empat aspek utama yaitu :

1. Fungsi dan peranan Kabupaten Kapuas Hulu seperti yang digariskan melalui sistem pembagian Wilayah Pembangunan yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan dan Repelita Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
2. Struktur kawasan lindung dan budidaya yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat.
3. Sistem kota-kota di Kalimantan Barat, baik kondisi eksisting maupun rencana pola pengembangan sistem kota-kota yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Barat.
4. Keterkaitan ruang antar wilayah di Kalimantan Barat terutama dikaitkan dengan sistem transportasi yang ada dan rencana pengembangan yang telah tertuang dalam RTRWP Kalimantan Barat.

Sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, maka Kabupaten Kapuas Hulu telah ditetapkan sebagai bagian Wilayah Pembangunan D bersama-sama dengan Kabupaten Sintang dengan Pusat Pengembangan di Kota Sintang. Kota Putussibau sebagai ibukota Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan sebagai salah satu subpusat pengembangan disamping Kota Semitau (Kabupaten Kapuas Hulu), Nanga Merakai dan Nanga Pinoh (Kabupaten Sintang). Ini berarti secara makro, Kabupaten Kapuas Hulu dinilai relatif erat kaitannya dengan Kabupaten Sintang yang secara fisik maupun ekonomis lebih berkembang.

Dalam rencana pemantapan kawasan lindung yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Barat, telah ditetapkan bahwa ± 44 % kawasan berfungsi lindung di Kalimantan Barat berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Jenis kawasan yang dilindungi yang cukup luas adalah Hutan Suaka Alam / Taman Nasional Betung Kerihun, Hutan Lindung dan Daerah Resapan Air. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geomorfologis Kabupaten Kapuas Hulu dimana sebagian besar daerah dengan kemiringan di atas 40 % dan ketinggian di atas 500 m (kriteria utama penentuan kawasan hutan lindung), berada di Kabupaten ini. Dengan demikian, keselamatan dan kelestarian lingkungan Kalimantan Barat banyak tergantung pada pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kata lain, dalam konteks propinsi, Kabupaten Kapuas Hulu berfungsi dan berperanan besar sebagai wilayah konservasi demi menjaga keselamatan dan kelestarian lingkungan baik Kabupaten Kapuas Hulu sendiri maupun wilayah lain terutama daerah sepanjang aliran Sungai Kapuas.

Sementara itu, dibagian lain RTRWP Kalimantan Barat Tahun 2008 yaitu dalam arahan pengembangan kawasan budidaya, Kabupaten Kapuas Hulu umumnya diarahkan pada pengembangan pertanian pangan terutama palawija (kacang tanah, kacang hijau dan kedelai) dan perikanan air tawar. Pengembangan kegiatan budidaya tersebut dimaksudkan untuk menunjang kegiatan industri pengolahan hasil pertanian di Kota Sintang (sebagai pusat WP D).

Diharapkan pula Kabupaten Kapuas Hulu menjadi pemasok bahan makanan terutama palawija dan ikan air tawar bagi seluruh wilayah Kalimantan Barat bahkan ditingkatkan agar komoditi tersebut dapat diekspor ke luar Kalimantan Barat.

Berdasarkan kriteria penentuan pusat-pusat pertumbuhan yang berlaku bagi seluruh wilayah propinsi Kalimantan Barat, tercatat 38 pusat pertumbuhan utama di Kalimantan Barat, tiga diantaranya terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Putussibau, Selimbau dan Semitau. Sedangkan ibukota kecamatan lainnya hanya merupakan pusat pemerintahan dimana kantor camat berada dengan skala pelayanan maksimal wilayah kecamatannya masing-masing. Bila kita lihat sepiintas letak geografis ketiga pusat tersebut, dapat dikatakan bahwa Putussibau merupakan pusat pertumbuhan wilayah timur kabupaten, Semitau sebagai pusat pertumbuhan wilayah barat kabupaten sedangkan Selimbau merupakan pusat pertumbuhan diantara kedua wilayah timur dan barat.

Dalam skala propinsi, Kota Putussibau diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan orde ketiga, Semitau sebagai pusat pertumbuhan orde keempat sedangkan Selimbau diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan orde kelima. Ini berarti, dalam skala kabupaten, Putussibau dapat dianggap sebagai pusat pertumbuhan orde kesatu, Semitau kedua dan Selimbau ketiga.

Kota Putussibau, seperti hasil indentifikasi skala propinsi, merupakan pusat orde pertama dalam skala Kabupaten Kapuas Hulu. Kota ini memiliki hampir semua fungsi yang telah ditelaah. Indeks Sentralitas kota tersebut sebesar 218,0; jauh diatas kota-kota lainnya. Kota ini memiliki fungsi sebagai:

- pusat permukiman,
- pusat pemasaran dan perdagangan,
- pusat perhubungan dan (tele)komunikasi,
- tempat kegiatan usaha jasa dan produksi, dan
- tempat pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi.

Melihat fungsinya yang relatif kompleks, dapat dikatakan bahwa Kota Putussibau merupakan pusat pelayanan utama wilayah Kapuas Hulu atau sebagai Pusat Pelayanan Regional. Sementara, sebagai kota orde kedua adalah Semitau dengan indeks sentralitas sebesar 123,3. Di kota orde kedua ini semua jenis fasilitas yang ditelaah telah ada, sama dengan di Kota Putussibau, hanya fasilitas kesehatan yang di Putussibau sudah pada tingkat Rumah Sakit, di Semitau hanya berupa Puskesmas. Dengan demikian dapat dikatakan, untuk kondisi saat ini kota Semitau lebih merupakan wakil Putussibau untuk melayani wilayah kabupaten bagian barat.

Kota-kota orde ketiga memiliki indeks sentralitas di atas 90 yaitu Nanga Tepuai dan Kedamin. Bila dalam analisis skala propinsi, kota yang diidentifikasi sebagai kota orde ketiga skala Kabupaten Kapuas Hulu (atau orde kelima skala propinsi) adalah Kota Selimbau. Akan tetapi, dalam analisis skala kabupaten ternyata Kota Selimbau hanya menduduki hirarkhi ke empat. Hal yang menarik disini adalah terjadinya pergeseran peranan Kota Nanga Tepuai yang menggantikan posisi Kota Selimbau dan Nanga Bunut yang pada tahun 1990 masih merupakan kota orde ketiga. Hal ini lebih disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan Kota Nanga Tepuai sebagai akibat besarnya peranan jalur lintas selatan yang melaluinya. Sedangkan Kota Kedamin teridentifikasi sebagai kota orde ketiga lebih disebabkan oleh kedekatannya dengan Kota Putussibau.

Integrasi merupakan indikator tingkat kemampuan suatu wilayah dalam memiliki keuntungan internal yang dapat terus berlangsung di dalamnya dan kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam interaksi terhadap wilayah luar (eksternal) atau perekonomian regional dan nasional. Integrasi terutama ditentukan oleh jumlah interaksi yang timbul diantara pusat-pusat permukiman dalam suatu wilayah. Jumlah interaksi dalam suatu sistem spasial tergantung pada tingkat artikulasi dalam hirarkhi pusat-pusat permukiman, jarak antar pusat, akses yang efektif bagi penduduk untuk mencapai pusat lainnya serta keragaman jumlah fungsi-fungsi dalam pusat tadi.

Berdasarkan jumlah interaksi yang ditimbulkan akibat keterkaitan antar pusat, Kabupaten Kapuas Hulu dibagi menjadi 2 sistem pusat yaitu :

❖ **Sistem Pusat-Pusat Kapuas Hulu Timur**

Sistem pusat-pusat ini meliputi kota-kota Putussibau, Nanga Bunut, Nanga Embaloh, Bika, Kedamin, Kalis, Mentebah, Banua Martinus dan Nanga Suruk. Sistem pusat-pusat ini berorientasi ke Kota Putussibau. Kota ini disamping sebagai pusat pengembangan regional (kabupaten) juga berfungsi sebagai pusat pengembangan subregional Kabupaten Kapuas Hulu bagian timur, dan pusat pengembangan lokal dengan wilayah pengembangan Kecamatan Putussibau, Kedamin, Kalis, Embaloh Hilir, Embaloh Hulu, Bunut Hulu, Mentebah dan Kecamatan Manday. Sedangkan Kota Nanga Bunut menjadi pusat pengembangan lokal yang meliputi Kecamatan Bunut Hilir dan Embaloh Hilir.

❖ **Sistem Pusat-Pusat Kapuas Hulu Barat**

Sistem pusat-pusat Kapuas Hulu bagian barat ini meliputi kota-kota Semitau, Suhaid, Selimbau, Batu Datu, Nanga Silat, Nanga Badau, Jongkong, Sejiram, Nanga Dangan, Nanga Tepuai, Boyan Tanjung, Lanjak, Nanga Kantuk dan Puring Kencana. Orientasi utama sistem pusat ini adalah Kota Semitau yang berfungsi sebagai pusat pengembangan subregional Kapuas Hulu Barat dan sekaligus pusat pengembangan lokal yang meliputi Kecamatan Semitau, Selimbau, Silat Hilir, Suhaid, Silat Hulu, Seberuang, Empanang, Nanga Badau, Puring Kencana, dan Batang Lupar. Sedangkan kecamatan-kecamatan Embau, Hulu Gurung Batu Datu dan Boyan Tanjung berorientasi lokal ke Kota Nanga Tepuai.

Struktur pusat-pusat pelayanan ini masih akan terus bergeser sejalan dengan perkembangan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu terutama sebagai konsekuensi logis dari perkembangan peranan transportasi darat yang notabene lebih ekonomis dibandingkan dengan sistem transportasi tradisional pelayaran sungai.

D.2. SISTEM TRANSPORTASI / PERANGKUTAN WILAYAH

Sistem perangkutan yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu secara garis besar merupakan paduan antara subsistem perhubungan darat, perhubungan sungai dan perhubungan udara. Arah kebijakan umum pembangunan transportasi yang telah dilaksanakan selama ini pada intinya menitikberatkan pada pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung pengembangan perdagangan global, membuka akses dan layanan perhubungan masyarakat serta meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas, sehingga diharapkan mampu menciptakan kelancaran dalam pergerakan arus barang dan penumpang. Pembangunan tersebut dilaksanakan melalui program-program kerja, seperti rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan; penataan terminal, dermaga dan bandara; pembangunan dan pemeliharaan halte; pengujian kendaraan bermotor; pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu di jalan, sungai dan danau; peningkatan jumlah jalan dan penggantian jembatan; peningkatan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan; serta pengembangan fasilitas lalu lintas jalan dan penerbangan.

Perangkutan sungai merupakan salah satu sarana penghubung yang cukup vital di kabupaten Kapuas Hulu yang umumnya digunakan sebagai sarana penghubung antar kecamatan ke desa atau antar kecamatan ke kabupaten dengan menggunakan sungai Kapuas sebagai jalur utama perhubungan dan perekonomian. Namun kondisi terakhir mencatat adanya kecenderungan penurunan pemanfaatan angkutan sungai di beberapa kecamatan yang dilalui aliran sungai, hal ini disebabkan karena beberapa kecamatan lintas sungai kapuas saat ini sudah banyak dan dapat dijangkau melalui jalan darat, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan jalan darat dengan biaya yang relatif lebih murah dan waktu atau jarak tempuh yang pendek dibandingkan jalur air/sungai.

Secara historis peranan pengangkutan sungai di Kabupaten Kapuas Hulu sangat penting dalam mendukung sistem pengangkutan barang dan penumpang lokal (intra dan antar kabupaten). Meskipun jaringan jalan raya (darat) sudah kian berkembang, peranan angkutan sungai masih tetap penting terutama pada daerah-daerah pedalaman yang sulit dijangkau jaringan jalan raya. Bahkan pada daerah dimana jalan raya melintas secara paralel dengan jalur pelayaran sungai, pengangkutan barang melalui sungai masih banyak dilakukan.

Tabel : 48
JALUR TRANSPORTASI SUNGAI DI KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA JALUR / SUNGAI	JALUR PELAYARAN
1	Sungai Kapuas	Putussibau - Pontianak
2	Sungai Nanga Manday	Hulu sungai Nanga Manday - Sungai Kalis
3	Sungai Embaloh	Embaloh Hilir - Embaloh Hulu
4	Sungai Bunut	Nanga Bunut - Bunut Hulu - Nanga Boyan - Sungai Mentebah - Sungai Nanga Sebilil
5	Sungai Embau	Jongkong - kec. Embau - Nanga Tepuai kec. Hulu Gurung
6	Perairan Selimbau	ke desa-desa di pinggiran danau di bagian Utara Selimbau
7	Perairan Suhaid	ke desa-desa di Utara melalui sungai Batang Tawang sampai ke sungai Batang Lupar
8	Sungai Silat Hilir	Sungai Dangkan Silat Hilir - Silat Hulu

Seluruh kota yang berada pada jalur Sungai Kapuas, boleh dikatakan memiliki akses cukup baik ke Putussibau dan Sintang. Jalur pelayaran orde kedua terjadi pada kota-kota pada jalur utama (Sungai Kapuas) dengan kota-kota di pedalaman. Dari Putussibau ke kota-kota di jalur utama dapat ditempuh antara 1,5 sampai 32 jam dengan motor tambang berkapasitas di atas 10 ton. Sedangkan jalur pelayaran orde kedua dapat ditempuh antara 5 sampai 10 jam dengan menggunakan motor air berkapasitas di bawah 10 ton. Sepuluh ibukota kecamatan berada pada jalur utama yang dapat dilalui motor tambang berkapasitas di atas 10 ton, sedangkan 13 ibukota kecamatan lainnya hanya dapat dilayani oleh pelayaran motor air berkapasitas di bawah 10 ton, bahkan ibukota Kecamatan Badau hanya dapat dijangkau dengan *longboat* dengan kapasitas maksimal 2,5 ton. Dengan demikian barang-barang dari Pontianak yang dibawa dengan motor tambang harus dipindahkan ke kapal motor air berukuran lebih kecil sebelum didistribusikan ke kota-kota kecamatan di pedalaman, demikian pula sebaliknya, hasil-hasil pertanian rakyat di pedalaman harus diangkut dengan motor air dan kemudian dipindahkan ke motor tambang di kota-kota kecamatan yang dilalui motor tambang. Fenomena tersebutlah yang menyebabkan barang-barang konsumsi dari luar Putussibau lebih mahal dan sebaliknya harga-harga produk pertanian dijual lebih murah.

Beberapa jenis atau sarana dan jumlah angkutan sungai yang tercatat pada tahun 2003 diantaranya adalah kapal sungai (297 unit), motor bandung (50 unit), motor tambang (18 unit) dan speed tambang sebanyak 68 unit. Sedangkan untuk tarif di beberapa jalur pengangkutan transportasi sungai ini diantaranya berkisar antara Rp 20.000,- sampai Rp 70.000,- dengan jarak tempuh 1,5 - 32 jam untuk trayek Putussibau-Sintang yang melayani jalur dari ibukota kabupaten ke ibukota-ibukota kecamatan, sedangkan untuk trayek Putussibau-Pontianak dengan jalur pelayanan yang sama, tarifnya berkisar Rp 15.000,- sampai Rp 60.000,- (jarak tempuh 1,5 - 28 jam). Sementara untuk besarnya tarif perjalanan angkutan sungai dari ibukota kecamatan pesisir sungai Kapuas ke ibukota kecamatan daerah pedalaman berkisar antara Rp 20.000,- sampai Rp 55.000,- dengan jarak tempuh 2 - 3,5 jam.

Kelancaran sistem perangkutan sungai sangat tergantung pada iklim dan cuaca terutama siklus hidrologi wilayah Kapuas Hulu. Pada musim kemarau, umumnya debit dan tinggi permukaan air sungai menurun sehingga kapasitas sungai sebagai jalur angkutan menjadi menurun pula. Bahkan, bila kemarau berjalan cukup panjang maka debit air Sungai Kapuas-pun sampai pada titik dimana motor tambang tidak dapat melaluinya. Di beberapa pusat permukiman dimana jalan raya sebagai alternatif belum berfungsi dengan baik, maka pada saat-saat kemarau panjang harga bahan-bahan pokok keperluan sehari-hari menjadi sangat mahal.

Kenyataan ini menunjukkan bagaimana pelayaran sungai di Kapuas Hulu merupakan sistem transportasi yang sangat vital. Ketergantungan perekonomian dan tingkat kesejahteraan penduduk Kapuas Hulu terhadap sistem perangkutan ini sangat tinggi. Oleh karena pelayaran

sungai sangat tergantung pada kondisi hidrologi wilayah, maka satu-satunya alternatif penanganan masalah ini adalah pengembangan jaringan jalan raya terutama di daerah-daerah pedalaman kecuali bila pemerintah mau mengendalikan penebangan dan perambahan hutan di hulu-hulu sungai besar sehingga fluktuasi debit air sungai dapat ditekan seminimal mungkin. Artinya, suatu usaha besar perlu dilakukan untuk mengembalikan siklus hidrologi pada kondisi yang wajar sehingga debit dan tinggi permukaan air sungai relatif stabil sepanjang tahun. Bila hal ini sulit dilakukan, maka pemerintah perlu membangun jaringan jalan raya untuk mengurangi ketergantungan wilayah terhadap perangkutan sungai.

Pengembangan sistem perangkutan jalan darat di Kabupaten Kapuas Hulu saat ini sudah sangat tepat yaitu dengan telah dikembangkannya prasarana jalan Lintas Selatan (Sintang-Putussibau) sebagai perpanjangan jalur arteri primer Pontianak–Sintang serta pengembangan prasarana jalan Lintas Utara dari Putussibau–Badau–Kabupaten Sintang. Kedua jalur regional ini melintasi kawasan pedalaman sebagai jawaban atas kelemahan sistem perangkutan sungai. Setidaknya di musim kemarau dimana perangkutan sungai mengalami kendala untuk mencapai kawasan pedalaman, pergerakan barang dan penumpang dapat dilakukan melalui jalan darat.

Konsekuensi logis dari pesatnya perkembangan sistem perangkutan darat ini adalah perubahan terhadap struktur tata ruang Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan, dimana perlahan namun pasti pada simpul-simpul strategis di sepanjang Jalan Lintas Selatan maupun Lintas Utara mulai tumbuh embrio pusat-pusat permukiman yang hampir dapat dipastikan kelak akan tumbuh menjadi pusat-pusat pelayanan bahkan pusat pertumbuhan regional baru. Bagaimanapun juga transportasi darat lebih diminati dan lebih menguntungkan daripada sistem angkutan sungai sehingga orientasi pergerakan dan orientasi perekonomian wilayah akan berubah sesuai pola jaringan jalan yang berkembang.

Namun demikian, pusat-pusat permukiman di sepanjang Sungai Kapuas masih akan berkembang walaupun pada tingkat yang semakin rendah dan akan masih mengandalkan sistem transportasi sungai, karena di samping besarnya investasi dalam bentuk sarana dan prasarana sosial ekonomi telah ditanamkan di kawasan ini, belum semua pusat permukiman di sepanjang Sungai Kapuas ini memiliki akses tinggi ke jalur Lintas Selatan maupun Lintas Utara.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, tercatat panjang prasarana angkutan darat yakni berupa jalan darat (jalan kabupaten) di Kabupaten Kapuas Hulu adalah sepanjang 998,59 km pada akhir tahun 2004 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 16,61% dari periode awal tahun 2000 yang sepanjang 856,35 km, dengan rincian jenis permukaan masing-masing 281,54 km berupa jalan aspal, 320,77 km jalan kerikil dan jalan tanah sepanjang 396,28 km. Sementara untuk jalan propinsi tercatat sepanjang 231,44 km yang merupakan sebagian dari ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Sintang dan Putussibau, yang lebih dikenal dengan Lintas Selatan.

Jalan Kabupaten yang sebagian besar masih berupa jalan tanah (40%) umumnya masih dalam kondisi rusak dan rusak berat (76%). Hanya sekitar 0,05% atau sepanjang 0,5 km jalan kabupaten ini berada dalam kondisi baik, sedangkan sisanya sepanjang 237,26 km atau sekitar 23,76% dalam kondisi sedang. Jika dibandingkan dengan kondisi jalan pada tahun 2002-2003 sebelumnya, terlihat peningkatan jumlah atau panjang ruas jalan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas jalan itu sendiri. Sebagai contoh kondisi jalan baik yang tercatat pada tahun 2002 masih sepanjang 229,58 km namun pada tahun 2003 hanya tercatat sebesar 0,5 km saja yang artinya mengalami penurunan kualitas jalan hampir 99,8%. Hal ini cukup mengindikasikan bahwa jaringan jalan darat yang ada saat ini, secara kualitas belum berperan besar dalam menunjang mobilitas penumpang dan barang, baik lokal maupun antar kabupaten. Jalan-jalan yang beraspal dan kondisi sedang/baik umumnya baru terdapat pada jaringan jalan dalam kota-kota utama, seperti Putussibau dan Semitau.

Selain jaringan jalan, tercatat pula jumlah jembatan yang dibangun di sepanjang jalan kabupaten Kapuas Hulu hingga periode akhir tahun 2004 adalah sepanjang 4.305 meter dengan jumlah fisik jembatan lebih kurang 260 buah (meningkat sebanyak 7 jembatan atau 2,77% dibanding tahun 2000) yang berlokasi di sekitar 25 ruas jalan kabupaten yang ada. Jumlah jembatan saat ini yang dalam kondisi baik dan layak dilalui adalah sebanyak 177 jembatan atau hanya sekitar 68% dari total keseluruhan jembatan yang ada, selebihnya tercatat kondisinya sedang, rusak dan rusak

berat. Adapun nilai keseluruhan jembatan ini, diperkirakan sekitar Rp 74.533.530.838,00 (berdasarkan data Neraca Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2003)

Untuk sarana angkutan jalan darat berupa kendaraan bermotor, tercatat pada tahun 2003 mengalami kenaikan, yakni sebanyak 5.902 unit pada tahun 2003, naik sebesar 26,8% dari tahun 2002 yang tercatat sejumlah 4.654 unit kendaraan. Jenis kendaraan yang paling banyak ditemukan adalah jenis kendaraan sepeda motor yang pada tahun 2003 terdapat sebanyak 5.178 unit (88%). Sedangkan untuk jenis angkutan umum di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2003, terbanyak dari jenis kendaraan *pick up* (356 unit) dan Mikro/Mini Bus sebanyak 142 unit. Selain itu terdapat juga jenis angkutan umum lainnya, seperti oplet (69 unit), bus (63 unit) dan jenis kendaraan truk (29 unit).

Selain itu berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, jumlah terminal yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu hingga tahun 2004 tercatat sebanyak 6 terminal atau bertambah 4 unit dibanding tahun 2000 yang hanya berjumlah 2 unit yang berlokasi di Kecamatan Putussibau dan Kedamin. Dengan penambahan tersebut, berarti saat ini fasilitas terminal angkutan darat sudah dapat ditemukan di Kecamatan Badau, Batang Lupar, Semitau dan Kecamatan Suhaid selain di kedua kecamatan yang telah disebutkan sebelumnya.

Tabel : 49
STATUS, KONDISI DAN PANJANG JALAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2000-2004

NO	PRASARANA JALAN	STATUS JALAN DAN PANJANG JALAN (meter)									
		2000		2001		2002		2003		2004	
		JALAN PROPINSI	JALAN KABUPATEN	JALAN PROPINSI	JALAN KABUPATEN	JALAN PROPINSI	JALAN KABUPATEN	JALAN PROPINSI	JALAN KABUPATEN	JALAN PROPINSI	JALAN KABUPATEN
1	JENIS PERMUKAAN										
	a. Diaspal	229.600,00	199.630,00	229.600,00	225.980,00	231.438,00	229.580,00	231.438,00	248.403,00	231.438,00	281.540,00
	b. Kerikil	450,00	201.450,00	450,00	175.100,00	4.597,00	230.050,00	4.579,00	278.637,00	4.579,00	320.773,00
	c. Tanah		216.900,00		176.200,00		121.250,00		430.350,00		396.275,00
	d. Tidak Dirinci		238.370,00		279.070,00		275.470,00				
	Jumlah	230.050,00	856.350,00	230.050,00	856.350,00	236.035,00	856.350,00	236.017,00	957.390,00	236.017,00	998.588,00
2	KONDISI JALAN										
	a. Baik	140.750,00	199.630,00	145.750,00	225.980,00	148.187,00	229.580,00	165.187,00	80.413,00	165.187,00	504,00
	b. Sedang	49.200,00	201.450,00	52.250,00	175.100,00	59.898,00	230.050,00	42.898,00	384.927,00	42.898,00	237.255,00
	c. Rusak	32.000,00	216.900,00	30.550,00	176.200,00	26.000,00	121.250,00	26.750,00	114.350,00	26.750,00	295.917,00
	d. Rusak Berat	8.100,00	238.370,00	1.500,00	279.070,00	1.950,00	275.470,00	1.200,00	377.700,00	1.200,00	464.912,00
	Jumlah	230.050,00	856.350,00	230.050,00	856.350,00	236.035,00	856.350,00	236.035,00	957.390,00	236.035,00	998.588,00
3	KELAS JALAN										
	a. Kelas I										
	b. Kelas II	203.850,00		203.850,00		210.035,00		210.035,00		210.035,00	
	c. Kelas III										
	d. Kelas IIIA	26.200,00	199.630,00	26.200,00	225.980,00	26.000,00	229.580,00	26.000,00		26.000,00	
	e. Kelas IIIB										
	f. Kelas IIIC		201.450,00		175.100,00		230.050,00		527.040,00		602.313,00
	g. Tidak Dirinci		455.270,00		455.270,00		396.720,00		430.350,00		396.275,00
	Jumlah	230.050,00	856.350,00	230.050,00	856.350,00	236.035,00	856.350,00	236.035,00	957.390,00	236.035,00	998.588,00

Sumber : Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka, 2000-2003, Dinas Perhubungan dan Kemprasawil Kapuas Hulu, 2004

Sub sistem perhubungan udara di Kabupaten Kapuas Hulu saat ini hanya dilayani oleh prasarana penerbangan komersial Bandara Pangsuma Putussibau yang merupakan pelabuhan udara perintis, dengan perusahaan penerbangan yakni Dirgantara Air Service (DAS) dan Merpati yang melayani jalur penerbangan Putussibau-Pontianak. Pada tahun 2003, jumlah sarana angkutan udara berupa pesawat terbang yang berangkat dan datang melalui Pelabuhan Pangsuma Putussibau tercatat sebanyak 187 penerbangan. Angka ini mengalami penurunan sebesar 6,50% dibandingkan dengan jumlah pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk data penumpang yang berangkat dan datang, masing-masing sebanyak 4.196 orang dan 3.740 orang yang berarti mengalami kenaikan dibanding tahun 2002 yang masing-masing tercatat sebanyak 1.425 dan 1.402 orang. Peningkatan dari jumlah penumpang ini disebabkan oleh karena jenis pesawat yang beroperasi pada jalur Putussibau-Pontianak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni pesawatnya dari jenis yang lebih besar sehingga daya tampungnyapun lebih banyak pula.

Tabel : 50
**LALU LINTAS PESAWAT, PENUMPANG DAN BARANG/CARGO
MELALUI PELABUHAN UDARA PANGSUMA PUTUSSIBAU TAHUN 2000 - 2003**

NO	LALU LINTAS	JUMLAH							
		2000		2001		2002		2003	
		DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT
1	Pesawat Terbang	216,00	216,00	157,00	157,00	200,00	200,00	187,00	187,00
2	Penumpang (Orang)	1.323,00	1.270,00	1.144,00	1.007,00	1.402,00	1.425,00	3.740,00	4.196,00
3	Bagasi (Kg)	8.899,00	9.136,00	7.307,00	6.702,00	10.202,00	10.473,00	21.803,00	26.041,00
4	Barang (Kg)	9,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka, 2000-2003

Secara umum, dilihat dari sistem pengangkutan atau transportasi di Kabupaten Kapuas Hulu, dapat disimpulkan bahwa belum seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mendapat layanan jaringan transportasi yang baik. Jalur pelayaran sungai yang saat ini dianggap sebagai jalur yang memiliki akses paling tinggi dari dan ke bagian lain wilayah kabupaten merupakan wilayah yang digolongkan sebagai wilayah yang paling mudah dicapai. Apalagi bila jalur jalan darat Lintas Selatan dapat berfungsi baik maka wilayah jalur Sungai Kapuas ini akan menjadi semakin penting dan melebar ke arah Selatan. Tetapi untuk kondisi saat ini wilayah sekitar ruas jalan Lintas Selatan baru dapat digolongkan sebagai wilayah yang memiliki akses sedang karena ketergantungan wilayah ini terhadap wilayah jalur pelayaran Sungai Kapuas masih tinggi. Wilayah-wilayah lain seperti sekitar jalur pelayaran Sungai Embaloh dan jalur jalan darat Putussibau - Tanjungkerja - Benua Martinus - Lanjak - Badau - Nanga Kantuk sampai ke perbatasan Kabupaten Sintang juga digolongkan sebagai wilayah dengan aksesibilitas sedang. Sedangkan wilayah-wilayah lain merupakan wilayah dengan aksesibilitas rendah yang umumnya sangat sulit dicapai baik melalui sungai maupun darat.

D.3. SISTEM PELAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Lalu lintas berita, uang dan barang merupakan jaringan yang penting di setiap daerah, dimana bidang komunikasi ini memiliki jangkauan lebih luas terhadap perkembangan kehidupan masyarakat dan menjadi faktor yang mempengaruhi proses perubahan yang terjadi. Peningkatan penyelenggaraan serta pembangunan bidang komunikasi ini telah meningkatkan pula penyebaran informasi dalam segala aspek kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta memiliki fungsi sosial berupa minimalisasi dan eliminasi terisolirnya daerah terpencil.

Penyelenggaraan kegiatan bidang komunikasi di Kabupaten Kapuas Hulu didukung oleh sarana prasarana pos dan giro serta telekomunikasi yang meliputi telepon, telex, faksimili dan telegram yang dikelola oleh Perum Pos-Giro dan Perumtel. Selain itu tercatat pula adanya pemancar stasiun *relay* TVRI di beberapa kecamatan sebagai media informasi audio visual, disamping juga berbagai media elektronik lain seperti radio serta media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, bulletin dan lain-lain yang kesemuanya mendukung kebutuhan masyarakat akan berita, informasi dan hiburan.

Untuk tahun 2003, banyaknya kapasitas sentral telekomunikasi meningkat 2,64% dari tahun 2002, yakni dari 1.290 menjadi 1.324 kapasitas sentral pada tahun 2003. Demikian juga sentral yang terisi meningkat 2,04% dari 1.276 menjadi 1.302 sentral yang terisi. Hal yang sama juga tercatat dari jumlah pelanggan yang secara keseluruhan jenis pelanggan mengalami peningkatan dari 1.276 pelanggan menjadi 1.302 pelanggan atau naik 2,04%. Dari kategori pelanggan, jumlah pelanggan terbesar tahun 2003 yakni terdiri dari perumahan sebesar 741 pelanggan (turun 3,64% dari tahun 2002), kemudian dari bisnis/usaha sebesar 459 pelanggan, dilanjutkan, wartel (56), kios pon (26) serta dinas telkom dan sosial masing-masing sebanyak 10 pelanggan.

Tabel : 51
DATA PERKEMBANGAN PRASARANA SARANA KOMUNIKASI
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2000-2004

NO	URAIAN	JUMLAH				
		2000	2001	2002	2003	2004
1	JASA POS DAN GIRO					
	a. Penerimaan Surat	26.113	55.810	74.078	60.670	
	b. Pengiriman Surat	15.237	45.692	61.354	54.005	
	c. Penerimaan Paket Pos	2.292	4.720	2.993	2.816	
	d. Pengiriman Paket Pos	1.880	2.697	3.022	1.738	
	e. Penerimaan Wesel	4.481	8.014	8.975	3.286	
	f. Pengiriman Wesel	14.021	13.566	15.193	10.452	
	Jumlah	64.024	130.499	165.615	132.967	0
2	JASA TELEKOMUNIKASI					
	a. Kapasitas Sentral Telepon (unit)	1.040	1.226	1.290	1.324	1.346
	b. Sentral yang Terisi (unit)	1.032	1.172	1.276	1.302	1.324
	c. Jumlah Pelanggan	1.032	1.172	1.276	1.302	1.324
	d. Telepon Umum (unit)	12	11	-	-	-

Sumber : Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka, 2000-2003; dan Data Perumtel Kapuas Hulu 2004

Sementara itu, sampai tahun 2003 pelayanan pos dan giro di Kabupaten Kapuas Hulu saat ini dilayani melalui fasilitas-fasilitas berupa 1 (satu) unit kantor pos utama atau kantor pusat di Kota Putussibau, 12 unit kantor pos pembantu tersebar di 12 Ibukota Kecamatan dan 5 unit pos desa yang tersebar di desa Sibau Hulu, Bika, Nanga Suruk, Sejiram dan Nanga Dangan. Pada tahun 2003 banyaknya pengiriman dan penerimaan surat, paket pos maupun wesel di kantor pos di Kabupaten Kapuas Hulu tercatat mencapai 122.967 atau mengalami penurunan jumlah sekitar 19,7% dari tahun 2002 sebelumnya, dengan nilai Rp 3.431.871.467,- yang dihitung dari nilai pengiriman surat dan paket pos, nilai penjualan benda pos dan bea wesel pos serta nilai pengiriman dan penerimaan wesel pos. Nilai ini juga mengalami penurunan sebesar Rp 205.219.563,- dibanding tahun 2002.

Sebagai sarana audio visual, keberadaan sarana televisi saat ini di Kabupaten Kapuas Hulu sudah merupakan salah satu kebutuhan yang cukup penting terutama dalam hal pengetahuan dan penyebaran terhadap berita, informasi dan hiburan. Sebagai langkah pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sejak tahun 1982 telah membangun dan mengoperasikan beberapa pemancar stasiun *relay* TVRI di beberapa kecamatan di Kapuas Hulu. Salah satunya adalah pemancar yang dibangun di Semitau yang dibangun tahun 1999 dengan kekuatan pemancar sebesar 1000 Watt. Pemancar ini dibangun untuk melengkapi keberadaan pemancar lain yang telah dibangun sebelumnya, yakni pemancar yang berlokasi di Putussibau dengan kekuatan pemancar 100 Watt yang merupakan bangunan pemancar stasiun *relay* pertama dibangun yaitu tahun 1982. Kemudian tercatat pula pemancar dengan kekuatan 10 Watt masing-masing dibangun di Nanga Badau dan Nanga Tepuai pada tahun 1992 dan 1994.

Beberapa prasarana sarana komunikasi dan informasi juga tercatat di kabupaten Kapuas Hulu selain yang telah disebutkan di atas, yakni Balai Penerangan sebanyak 2 buah, Pos Penerangan Pedesaan sebanyak 43 buah, Pusat Informasi Pesantren 23 buah serta pembinaan Kelompencapir sebanyak 124 buah.

D.4. SISTEM PELAYANAN ENERGI

Meningkatnya kegiatan pembangunan terutama di sektor industri, tentunya memberikan dampak berupa peningkatan terhadap permintaan tenaga listrik. Sebagai upaya pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga listrik tersebut, perlu kiranya mendapat perhatian yang serius terutama mencari

alternatif sumber tenaga listrik seperti upaya-upaya pemanfaatan bahan mineral sebagai sumber utama yang dapat menghasilkan energi listrik.

Kebutuhan listrik wilayah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini dilayani oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan non-PLN. Sampai tahun 2003 sudah semua Ibukota Kecamatan yang terjangkau pelayanan listrik negara, yakni terdiri dari 1 (satu) sumber listrik sentral atau ranting yang berlokasi di Putussibau, 4 (empat) sub ranting serta 19 (sembilan belas) dilayani melalui listrik desa. Semua kecamatan tersebut dilayani dengan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas berkisar antara 40 -100 KW kecuali Putussibau dengan kapasitas terpasang 9.954 KW yang memiliki kapasitas mampu sebesar 7.192 KW dan beban puncak 4.918 KW.

Data energi listrik yang diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) ranting Putussibau, untuk tahun 2003, jumlah produksi untuk keseluruhan sumber listrik mencapai 21.112.061 KWH dengan pelanggan listrik mencapai 16.682 pelanggan (naik 6,80% dari tahun sebelumnya).

Tabel : 52
PRODUKSI DAN JUMLAH PELANGGAN LISTRIK PLN
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 1999-2003

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGAN	PRODUKSI (KW)	TERJUAL		PEMAKAIAN SENDIRI		HILANG	
				KWH	%	KWH	%	KWH	%
1	1999	13.191	12.542.053	11.690.337	93,21	356.647	2,84	693.732	5,53
2	2000	14.263	14.886.260	13.185.698	88,58	367.192	2,47	1.045.979	7,03
3	2001	15.238	17.404.460	14.771.458	84,87	364.386	2,09	1.654.294	9,51
4	2002	15.620	19.309.787	17.150.416	88,82	402.267	2,08	3.085.551	15,98
5	2003	16.682	21.112.061	16.612.275	78,69	532.314	2,52	3.760.291	17,81
PERTUMBUHAN (%/th)		6,07	13,97	9,45		11,23		54,33	

Sumber : Kapuas Hulu Dalam Angka, 1999-2003

Jumlah ini relatif lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan 3 (tiga) tahun sebelumnya. Bila dilihat perkembangan jumlah pelanggan dari tahun 1999-2003 maka dapat dihitung bahwa peningkatan jumlah pelanggan listrik negara meningkat rata-rata 6,07% pertahun.

Seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan, produksi listrikpun mengalami peningkatan dengan laju rata-rata 13,97% pertahun. Sementara energi listrik yang terjual juga mengalami peningkatan sebesar 9,45% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan listrik per pelanggan masih tinggi. Akan tetapi bila energi listrik yang terjual mengalami peningkatan dengan laju yang lebih rendah daripada laju peningkatan jumlah produksi, berarti efisiensi produksi listrik di Kapuas Hulu semakin rendah dari tahun ke tahun. Hal ini juga diperkuat dengan besarnya tingkat kebocoran listrik yang meningkat 54,33% pertahun bahkan angka kebocoran ini sudah berada diatas 10% setiap tahunnya khususnya yang terjadi pada tahun 2002 dan 2003 yang cenderung meningkat persentasenya terhadap produksi total.

Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat telah merencanakan beberapa pembangkit listrik tenaga air dan uap, dimana salah satunya berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu di Nanga Silat. Pembangkit listrik ini menggunakan tenaga air yang direncanakan akan menghasilkan energi listrik sebesar 21 MW. Dengan adanya pembangkit listrik tenaga air ini, maka setidaknya wilayah Kabupaten Kapuas Hulu bagian Barat akan dapat terlayani melalui sumber ini. Sedangkan pembangkit tenaga diesel yang ada dapat dialihkan ke daerah Timur yang cukup sulit dicapai oleh jaringan transmisi pembangkit tenaga air tersebut.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, khususnya pengguna dan pelanggan listrik di Kapuas Hulu, pihak PLN telah menempatkan beberapa tenaga atau pegawai, baik tenaga teknisi maupun non teknisi yang berjumlah 143 orang yang tercatat pada tahun 2004. Dari 143 pegawai PT PLN tersebut, 114 merupakan tenaga teknis yang selalu siap melayani

berbagai kerusakan ataupun keluhan masyarakat berkaitan dengan sistem jaringan ataupun berbagai fasilitas kelistrikan yang terpasang.

Selanjutnya, seperti halnya sumber energi listrik, hal yang sama terjadi pula pada pelayanan terhadap kebutuhan bahan bakar, terutama minyak tanah, premium dan solar yang mana permintaan dan pemakaiannya meningkat terus dalam tiap tahunnya, baik untuk keperluan konsumsi rumah tangga maupun untuk usaha. Pada tahun 2004, Pertamina Unit Pemasaran VI Cabang Pontianak telah mencatat besarnya pendistribusian bahan bakar minyak ke wilayah Kapuas Hulu, yakni 8.137.000 liter bahan bakar premium atau bensin, 6.598.000 liter solar dan 10.848.000 liter minyak tanah.

D.5. SISTEM PELAYANAN AIR BERSIH

Seperti halnya kebutuhan terhadap energi listrik dan bahan bakar, hal serupa terjadi juga pada kebutuhan akan air bersih yang mengalami peningkatan sebagai dampak dari peningkatan kegiatan pembangunan khususnya di sektor industri. Adapun sistem pelayanan sarana air bersih di Kapuas Hulu hingga tahun 2004 tercatat baru dilayani dan dikelola oleh 1 (satu) perusahaan Air Minum (PDAM) dengan sumber air baku dari air sungai yang baru menjangkau Kota Putussibau sebagai Ibukota Kabupaten dan beberapa kecamatan saja. Penduduk lainnya di kota-kota kecamatan umumnya menggunakan air Sungai Kapuas sebagai sumber air utama untuk keperluan sehari-hari disamping juga mengandalkan air hujan dan sebagian kecil saja menggunakan air tanah dengan membuat sumur-sumur dangkal. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tercatat sebagian besar penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu mengandalkan sumber air minum yang berasal dari air di sepanjang aliran sungai Kapuas, yakni hampir 70% dari seluruh penduduk di Kapuas Hulu. Sementara pemanfaatan sumber air ledeng yang dikelola oleh PDAM hanya sebesar 19,37 dari seluruh jumlah pengguna atau penduduk yang membutuhkan air minum.

Seperti yang telah disebutkan di atas, perusahaan pengelola air minum yang ada saat ini menggunakan sumber air baku yakni dari sumber air sungai Kapuas yang selanjutnya dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk memperoleh kualitas air minum yang benar-benar terjamin kemurnian dan hygienisnya sebelum didistribusikan kepada masyarakat berupa air bersih dan air minum.

Adapun hingga tahun 2003, jumlah pelanggan yang terlayani jaringan air bersih dari saluran pipa air PDAM adalah sebanyak 4.793 pelanggan yang berarti terjadi peningkatan sebesar 9,78% dibanding tahun 2002 yang tercatat sebanyak 4.366 pelanggan. Disamping itu, tercatat pula sebaran pelayanan penyaluran air minum sesuai jenis pelanggannya. Untuk rumah tempat tinggal tercatat sebanyak 4.265 pelanggan (naik 10,86% dari tahun sebelumnya), sementara pelanggan perusahaan dan pertokoan mengalami kenaikan sebesar 7,17%. Sedangkan badan-badan sosial tetap 2 pelanggan, hotel bertambah satu menjadi 4 pelanggan, rumah ibadah 85 pelanggan (naik 7,59%), tempat-tempat umum sebanyak 40 pelanggan (turun 2,44%), instansi pemerintah naik 9,72% menjadi 79 pelanggan dan lain-lain juga bertambah 3 menjadi 4 pelanggan.

Adapun produksi air bersih yang disalurkan kepada pelanggan untuk tahun 2003 adalah sebanyak 1.390.171 m³ yang berarti mengalami peningkatan sebesar 39,60% dari tahun 2002 sebelumnya. Peningkatan volume air yang disalurkan ini termasuk pula diantaranya peningkatan kebocoran sebanyak 349.226 m³. Sementara besarnya pendapatan dari air minum yang disalurkan tahun 2003 yakni sebesar Rp 1.333.731.000,- atau jauh meningkat sebesar 63,79% dari tahun 2002 yang pendapatannya tercatat sebesar Rp 814.292.000,-.

Tabel : 53
**JUMLAH PELANGGAN, BANYAKNYA DAN NILAI PENYALURAN AIR BERSIH
 KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2000 - 2003**

NO	JENIS PELANGGAN	JUMLAH											
		2000			2001			2002			2003		
		Pelanggan	Disalurkan (M3)	Nilai (Rp)	Pelanggan	Disalurkan (M3)	Nilai (Rp)	Pelanggan	Disalurkan (M3)	Nilai (Rp)	Pelanggan	Disalurkan (M3)	Nilai (Rp)
1	Rumah Tempat Tinggal	3.464	273.662	155.282.000	3.536	299.542	159.243.000	3.875	149.448	760.526.000	4.265	862.643	909.748.000
2	Hotel / Obyek Pariwisata	4	932	1.519.000	4	996	1.928.000	3	168	10.874.000	4	3.816	11.316.000
3	Badan Sosial dan Rumah Sakit	2	5.938	1.012.000	2	7.536	5.026.000	2	7.860	6.540.000	2	1.786	7.439.000
4	Rumah Ibadah	83	1.558	2.926.000	85	1.841	2.999.000	79	616.640	6.853.000	85	22.136	18.894.000
5	Umum	51	10.241	1.644.000	51	12.021	1.897.000	41	1.001	5.814.000	40	11.580	11.765.000
6	Perusahaan dan Pertokoan	238	27.956	38.110.000	250	29.041	40.232.000	293	6.962	22.245.000	314	95.460	242.211.000
7	Instansi Pemerintah	74	6.842	7.342.000	75	7.421	9.473.000	72	1.840	1.080.000	79	41.520	120.270.000
8	Lain-Lain	5	144	898.000	5	257	707.000	1	240	360.000	4	2.004	12.088.000
9	Kebocoran	-	400.143	-	-	471.865	-	-	211.658	-	-	349.226	-
JUMLAH		3.921	727.416	208.733.000	4.008	830.520	221.505.000	4.366	995.817	814.292.000	4.793	1.390.171	1.333.731.000

Sumber : Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka, 2000-2003

D.6. SISTEM PENGAIRAN / JARINGAN IRIGASI

Untuk menunjang program peningkatan produksi tanaman pertanian dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, maka intensifikasi jaringan irigasi terus ditingkatkan oleh pemerintah setempat, baik melalui pembangunan jaringan baru maupun pemeliharaan terhadap jaringan irigasi yang telah ada. Pembangunan irigasi yang diupayakan adalah melalui pengembangan daerah rawa dan secara merata tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun sumberdaya air dan irigasi yang tercatat di Kabupaten Kapuas Hulu meliputi waduk, bendungan, saluran air, pintu air, tanggul banjir dan lain sejenisnya yang tersebar di hampir seluruh kecamatan dengan perkiraan nilai adalah sebesar Rp 5.255.322.296,67

Sistem pengairan tanah sawah di Kapuas Hulu tercatat sebagian besar mengandalkan sumber air hujan dalam pengusahaannya. Sistem pengairan tadah hujan paling banyak ditemukan yakni seluas 4.774 Ha pada tahun 2003 setelah sistem jaringan irigasi yang tercatat seluas 5.690 Ha. Sedangkan sistem pengairan lainnya adalah jenis pengairan lebak yang terdata seluas 1.459 Ha.

Sistem Jaringan Irigasi yang terbanyak diusahakan di berbagai kecamatan di kabupaten Kapuas Hulu adalah sistem Irigasi Sederhana PU yang tercatat seluas 2.087 Ha, kemudian disusul Irigasi Desa Non PU 1.435 Ha, Irigasi Setengah Teknis 1.354 Ha dan Irigasi Teknis seluas 814 Ha.

Tabel : 54
**INFRASTRUKTUR JARINGAN IRIGASI KONDISI TERAKHIR
 KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2003**

NO	NAMA / ITEM	UKURAN / JUMLAH	KETERANGAN
1	Bangunan Bendung	75 unit	Tersebar di seluruh kecamatan Nilai keseluruhan : Rp 5.255.322.296,67
2	Bangunan Bagi / Sadap	90 unit	
3	Bangunan Gorong-Gorong	38 unit	
4	Bangunan Talang	53 unit	
5	Bangunan Box Tersier	124 unit	
6	Bangunan Terjun	51 unit	
7	Bangunan Suplesi	25 unit	
8	Bangunan Pintu Air	23 unit	
9	Rumah Jaga	4 unit	
10	Saluran Pembuang	16.701 meter	
11	Saluran Primer	3.700 meter	
12	Saluran Sekunder	181.333 meter	
13	Saluran Tersier	46.400 meter	
14	Saluran Pasangan	5.535 meter	
15	Tanggul	12.394 meter	

Sumber : Neraca Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2003

E.1. WILAYAH PEMERINTAHAN

Pada tanggal 13 Januari 1953, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Daerah Tingkat II Kabupaten Kapuas Hulu pertama kali terbentuk bersamaan dengan Daerah Tingkat II lainnya yang ada di Kalimantan. Kepala Daerah atau Bupati yang pertama kali memimpin pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang beribukota Putussibau adalah Y.C. Oevang Oeray (1951-1955) dan dilanjutkan kemudian oleh Bupati Anang Adrak (1955-1956).

Tabel : 55
LUAS WILAYAH PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	KECAMATAN	IBUKOTA	JUMLAH PEMERINTAHAN		LUAS (KM2)	PERSENTASE (%)
			DESA / KELURAHAN	DUSUN		
1	Silat Hilir	Nanga Silat	9	29	1.177,10	3,94
2	Silat Hulu	Nanga Dangkan	7	16	1.061,80	3,56
3	Hulu Gurung	Nanga Tepuai	8	24	432,90	1,45
4	Bunut Hulu	Nanga Suruk	5	19	1.118,14	3,75
5	Mentebah	Nanga Mentebah	5	15	781,26	2,62
6	Manday	Bika	6	18	1.069,00	3,58
7	Kalis	Nanga Kalis	5	14	1.184,00	3,97
8	Kedamin	Kedamin Hulu	13	25	5.352,30	17,94
9	Embaloh Hilir	Nanga Embaloh	6	17	1.869,10	6,26
10	Bunut Hilir	Nanga Bunut	5	15	844,10	2,83
11	Boyan Tanjung	Nanga Boyan	5	15	824,00	2,76
12	Batu Datu	Menendang	5	16	531,20	1,78
13	Embau	Jongkong	6	20	422,50	1,42
14	Selimbau	Selimbau	8	22	999,24	3,35
15	Suhaid	Nanga Suhaid	5	15	620,56	2,08
16	Seberuang	Sejiram	7	39	573,80	1,92
17	Semitau	Semitau	5	13	562,70	1,89
18	Empanang	Nanga Kantuk	5	10	357,25	1,20
19	Puring Kencana	Puring Kencana	4	8	448,55	1,50
20	Badau	Badau	6	12	700,00	2,35
21	Batang Lupar	Lanjak	7	12	1.332,90	4,47
22	Embaloh Hulu	Banua Martinus	8	17	3.457,60	11,59
23	Putussibau	Putussibau	8	18	4.122,00	13,81
TOTAL			148	409	29.842,00	100,00

Sumber : Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka, 2003

Selanjutnya, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 353 Tahun 1987 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1996, luas wilayah pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan menjadi 23 wilayah Kecamatan yang sebelumnya hanya terdiri dari 16 kecamatan. 7 (tujuh) kecamatan lama mengalami pemekaran atau pecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yakni : Kecamatan Putussibau menjadi Kecamatan Putussibau dan Kedamin, Kecamatan Manday menjadi Kecamatan Manday dan Kalis, Kecamatan Bunut Hilir menjadi Kecamatan Bunut Hilir dan Boyan Tanjung, Kecamatan Bunut Hulu menjadi Kecamatan Bunut Hulu dan Mentebah, Kecamatan Embau menjadi Kecamatan Embau dan Batu Datu, Kecamatan Semitau menjadi Kecamatan Semitau dan Suhaid serta Kecamatan Empanang menjadi Kecamatan Empanang dan Puring Kencana. Sementara itu, berdasarkan perkembangan pembangunan tiap kecamatan, hingga tahun 2004 telah terbentuk 144 wilayah Desa dan 4 Kelurahan yang seluruhnya sudah tergolong Desa Swadaya sejak tahun 2002. Pada tahun 2000-2001 sebelumnya tercatat sebanyak 66 masih tergolong desa swakarsa dan 79 desa termasuk desa swasembada.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2002, dari 148 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, hampir 74,48% masih tergolong tertinggal yakni sebanyak 108 desa/kelurahan dan sisanya 37 desa/kelurahan (25,52%) tidak tergolong desa/kelurahan tertinggal. Jika dibandingkan dengan pemerintahan Daerah Tingkat II lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki persentase tertinggi dalam jumlah desa/kelurahan tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian daerah sebagai indikator kesejahteraan masyarakat relatif masih rendah yang secara global dapat diindikasikan bahwa proses pembangunan wilayah dan masyarakat yang

dilaksanakan di sebagian besar wilayah pemerintahan desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, masih jauh dari harapan.

E.2. APARATUR PEMERINTAH DAN PENGAWASAN

Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan diarahkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi, produktivitas, profesionalisme dan penegakan disiplin pegawai dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, yang dilaksanakan melalui pembinaan yang terencana, bertahap dan berkelanjutan. Pembangunan aparatur pemerintahan juga diarahkan pada program-program pengembangan jabatan fungsional yang disertai peningkatan kesejahteraan pegawai serta penataan komposisi dan jumlah pegawai yang terdistribusi secara proporsional sehingga menumbuhkan budaya dan lingkungan kerja yang semakin baik dan kondusif.

Aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat memiliki tugas utama memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan bijaksana baik dalam menjalankan tugas negara, pemerintahan maupun dalam tugas pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1, 2 dan 3 Tahun 2001, perangkat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 12 Dinas Daerah, 8 Lembaga Teknis Daerah dan Perwakilan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Pontianak. Sumber data Kantor Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tercatat bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing Unit Kerja yang bekerja di pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu sampai akhir Desember tahun 2004 adalah sebanyak 4.548 orang. Dari 4.548 pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda tersebut, 86 orang merupakan golongan I (1,89%), 1.361 orang termasuk golongan II (29,93%), 2.664 orang golongan III (58,58%) dan yang termasuk golongan IV sebanyak 437 orang (9,61%).

Sedangkan PNS (instansi vertikal) yang bekerja diluar lingkungan Pemda hingga akhir tahun 2004 (berdasarkan data Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Kapuas Hulu Periode Tahun 2000-2005), tercatat sebanyak 569 orang. Dari jumlah tersebut tercatat jumlah pegawai golongan I sebanyak 40 orang (7,03%), golongan II sebanyak 329 orang (57,82%), golongan II berjumlah 192 orang (33,74%) serta golongan IV sebanyak 8 orang (1,41%) diluar pegawai PT. Telkom Cabang Putussibau.

Tabel : 56

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2004

NO	INSTANSI	GOLONGAN				TOTAL
		I	II	III	IV	
	LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (Hingga Akhir Tahun 2004)	86	1.361	2.664	437	4.548
1	Badan Pengawasan Daerah	1	6	17	4	28
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	7	21	5	33
3	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	2	56	38	2	98
4	Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Sosial	-	16	17	5	38
5	Dinas Kesehatan	3	231	137	2	373
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah	1	4	10	3	18
7	Dinas Pendapatan Daerah	-	7	20	4	31
8	Dinas Pendidikan	53	542	1.758	348	2.701
9	Dinas Perhubungan	-	9	21	2	32
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	6	14	4	24
11	Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah	11	31	30	3	75
12	Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup	-	4	12	3	19
13	Dinas Pertanian dan Irigasi	1	29	66	5	101
14	Dinas Tata Kota dan Kebersihan	-	8	12	4	24
15	Eks. BKKBN Kabupaten Kapuas Hulu	-	21	122	1	144
16	Kantor Kepegawaian Daerah	3	15	16	1	35
17	Kantor Koperasi, Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	-	3	13	1	17
18	Kantor Pemberdayaan Desa	-	5	11	1	17
19	Kantor Pengolahan Data dan Informasi	-	7	9	1	17
20	Kantor Polisi Pamong Praja	-	25	5	1	31
21	Kecamatan Badau	-	5	11	-	16
22	Kecamatan Batang Lupar	-	2	10	-	12
23	Kecamatan Batu Datu	-	2	4	3	9
24	Kecamatan Boyan Tanjung	-	5	5	-	10
25	Kecamatan Bunut Hilir	-	9	11	-	20
26	Kecamatan Bunut Hulu	-	3	7	3	13
27	Kecamatan Embaloh Hilir	-	7	7	3	17
28	Kecamatan Embaloh Hulu	1	8	11	1	21
29	Kecamatan Embau	-	7	14	1	22
30	Kecamatan Empanang	1	5	5	1	12
31	Kecamatan Hulu Gurung	-	10	9	1	20
32	Kecamatan Kalis	2	3	10	2	17
33	Kecamatan Kedamin	-	10	9	2	21
34	Kecamatan Manday	-	7	9	1	17
35	Kecamatan Mentebah	-	5	7	-	12
36	Kecamatan Puring Kencana	-	1	4	-	5
37	Kecamatan Putussibau	-	6	12	3	21
38	Kecamatan Seberuang	-	11	8	1	20
39	Kecamatan Selimbau	1	12	17	-	30
40	Kecamatan Semitau	-	16	11	1	28
41	Kecamatan Silat Hilir	1	7	6	-	14
42	Kecamatan Silat Hulu	-	9	6	-	15
43	Kecamatan Suhaid	1	2	11	1	15
44	Pemerintah Kelurahan Hilir Kantor	-	1	5	-	6
45	Pemerintah Kelurahan Kedamin Hilir	-	3	3	-	6
46	Pemerintah Kelurahan Kedamin Hulu	-	4	4	-	8
47	Pemerintah Kelurahan Putussibau Kota	-	4	4	-	8
48	Perwakilan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Pontianak	-	2	1	-	3
49	RSUD dr. A. Diponegoro Putussibau	-	62	25	-	87
50	Sanggar Kegiatan Belajar Putussibau	-	8	4	-	12
51	Sekretariat Daerah	4	85	50	10	149
52	Sekretariat DPRD	-	6	10	3	19
53	Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Hulu	-	2	5	-	7
	DILUAR LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (Hingga Akhir Tahun 2004)	40	329	192	8	569
1	Departemen Agama	1	109	54	2	166
2	Badan Pusat Statistik	0	12	16	1	29
3	Kantor BKKBN	1	92	67	1	161
4	Kantor Penyuluhan Pajak	0	1	1	0	2
5	Ruta Negara Kelas IIB	4	13	2	0	19
6	Kejaksaan Negeri	0	3	9	1	13
7	Pengadilan Negeri	2	9	6	1	18
8	Pengadilan Agama	0	9	10	0	19
9	BRI Cabang Putussibau	10	13	2	0	25
10	Bank Kalbar Cabang Putussibau	8	1	5	2	16
11	Bank Kalbar Cabang Semitau	7	13	1	0	21
12	Bank Kalbar Cabang Jongkong	3	2	0	0	5
13	PDAM Putussibau	0	1	0	0	1
14	PLN Ranting Putussibau	0	0	1	0	1
15	Kantor Cabang TELKOM	0	0	0	0	0
16	KPKN	0	7	8	0	15
17	PT ASKES Putussibau	0	0	1	0	1
18	Kantor Pos dan Giro	0	23	0	0	23
19	Kantor Seksi Logistik Putussibau	0	2	2	0	4
20	Kantor SKB	0	10	5	0	15
21	Bandar Udara Pangsuma	4	5	1	0	10
22	Stasiun Meteorologi Pangsuma	0	4	1	0	5
	JUMLAH	126	1.690	2.856	445	5.117

Sumber : Kantor Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, 2005 dan LPAJ Bupati Tahun 2000-2005

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, formasi jabatan struktural pada pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu disediakan untuk 463 jabatan, yakni terdiri dari : 1 orang untuk jabatan eselon II.a, 17 orang eselon II.b, 76 orang eselon III.a, 23 orang eselon III.b, 330 orang eselon IV.a dan sebanyak 16 orang diformasikan untuk mengisi jabatan pada eselon IV.b. Hingga bulan Desember 2004, dari 463 formasi tersebut, secara definitif

jabatan struktural yang telah terisi berjumlah 391 jabatan, sehingga formasi jabatan struktural yang lowong per 31 Desember 2004 masih sebanyak 72 jabatan. Adanya kekosongan ini dimungkinkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya sebagian promosi beberapa jabatan ke jenjang yang lebih tinggi serta adanya pejabat struktural yang pindah ke daerah lain, pensiun ataupun tugas belajar/pendidikan. Diantara formasi yang masih cukup banyak lowong saat ini adalah pada eselon IV.a yang berjumlah 56 serta eselon II.a dan eselon IV.b yang masing-masing berjumlah 11 dan 5 formasi jabatan, sedangkan eselon lainnya telah terisi semua.

Selanjutnya, sebagai implementasi terhadap Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengukuhkan kembali PNS yang ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional, dimana pada tahun 2003, pejabat fungsional yang telah dikukuhkan kembali yakni sebanyak 2.816 orang yang terdiri dari fungsional Guru (2.362 orang), fungsional Penyuluh Pertanian (41), fungsional bidang Kesehatan (374), fungsional Pengawas TK, SD, SLTP dan SMU/SMK (30) serta fungsional Pamong Belajar (9). Sedangkan pada tahun 2004, pejabat fungsional yang dikukuhkan kembali adalah sebanyak 142 orang, sehingga sampai dengan akhir tahun 2004, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah dikukuhkan kembali dalam jabatan fungsional menjadi sebanyak 2.958 orang.

Jumlah mutasi pegawai negeri sipil selama periode lima tahun terakhir, baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1999 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tercatat sebanyak 271 orang yang terhitung sejak tahun 2001 hingga tahun 2004. Mutasi terbanyak adalah mutasi PNS keluar Kabupaten Kapuas Hulu yang tercatat sebesar 257 orang, kemudian sebanyak 14 orang mutasi PNS yang masuk ke Kabupaten Kapuas Hulu. Sementara tidak tercatat adanya mutasi antar instansi di Kabupaten selama periode tersebut.

Tabel : 57
PERKEMBANGAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2001-2004

NO	URAIAN MUTASI	JUMLAH (orang)				TOTAL
		2001	2002	2003	2004	
1	Keluar dari Kabupaten Kapuas Hulu	54	65	73	65	257
2	Masuk ke Kabupaten Kapuas Hulu	4	5	3	2	14
3	Antar Instansi di Kabupaten Kapuas Hulu	0	0	0	0	0
JUMLAH		58	70	76	67	271

Sumber : KKD Kabupaten Kapuas Hulu 2004

Selanjutnya, berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu hingga saat ini tugas-tugas pelaksanaan tersebut menjadi tanggung jawab dan dibawah langsung oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun bidang-bidang yang diperiksa oleh badan ini sesuai Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BAWASDA, meliputi bidang Tugas Pokok dan Aparatur, Pendapatan dan Kekayaan serta bidang Belanja. Untuk hasil-hasil pemeriksaan yang telah dicapai selama periode tahun 2000 hingga tahun 2004 untuk bidang-bidang pengawasan tersebut, dapat dilihat pada **tabel 58**.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah Obrik yang telah diperiksa selama periode tersebut sebanyak 343 obrik dan telah diterbitkan sebanyak 343 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pemeriksaan tersebut telah menghasilkan 978 temuan dengan 1.086 rekomendasi yang mana 982 diantaranya telah ditindaklanjuti (90,42%) dan 12 rekomendasi dalam proses (1,10%). Sedangkan yang belum ditindaklanjuti hingga akhir tahun 2004 tercatat sebanyak 92 rekomendasi atau sebesar 8,47%.

Tabel : 58
PERKEMBANGAN PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2000-2004

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH					TOTAL
			2000	2001	2002	2003	2004	
1	Bidang Pemeriksaan	Bidang	7	4	4	4	4	23
2	Jumlah Obrik	Obrik	78	85	49	66	65	343
3	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	LHP	78	85	49	66	65	343
4	Jumlah Temuan	Temuan	221	251	154	205	147	978
5	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi	236	274	172	239	165	1.086
6	Status Tindak Lanjut							
	- Sudah Ditindaklanjuti	Rekomendasi	236	274	172	239	61	982
	- Dalam Proses	Rekomendasi	0	0	0	0	12	12
	- Belum Ditindaklanjuti	Rekomendasi	0	0	0	0	92	92

Sumber : BAWASDA Kabupaten Kapuas Hulu 2004

Pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada dasarnya juga diarahkan demi terwujudnya tertib pemerintahan sebagai upaya menciptakan *Good Governance* melalui upaya-upaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas KKN. Melalui media pertanggungjawaban secara periodik yakni berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), diharapkan setiap unit kerja di jajaran Pemerintah Daerah Kapuas Hulu dapat mempertanggungjawabkan amanahnya baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan kepada masyarakat.

Tabel : 59
IMPLEMENTASI SISTEM AKIP PEMDA DAN UNIT KERJA
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2001-2003

NO	URAIAN	YANG WAJIB MENERAPKAN			TELAH MENYUSUN LAKIP			YANG DIEVALUASI		
		2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003
1	Pemerintah Daerah (PEMDA)	1	1	1	1	1	1	0	1	1
2	Unit Kerja	19	21	21	0	21	21	0	8	0
	JUMLAH	20	22	22	1	22	22	0	9	1

Sumber : LAKIP Pemda Kabupaten Kapuas Hulu

Implementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2001-2003 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dimana tingkat implementasinya yang semula hanya 5% pada tahun 2001 berkembang pesat menjadi 100% pada tahun 2002 dan 2003, dimana dari 20 satuan kerja (Pemda dan Unit Kerja) yang wajib menerapkan LAKIP Tahun 2001 baru tersusun 1 LAKIP Kabupaten, sedangkan pada tahun 2002-2003 dari 22 satuan kerja yang wajib menerapkan LAKIP Tahun 2002 dan 2003, seluruhnya telah mampu menyusun LAKIP yang diwajibkan. Secara Nasional, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan LAKIP secara tepat waktu untuk tingkat kabupaten. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E.3. HUKUM DAN POLITIK

Bidang hukum diarahkan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam rangka terjaminnya kondisi masyarakat yang tertib, aman, tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan hukum yang optimal. Sektor yang terkait bidang hukum adalah sub sektor pembinaan hukum dan sub sektor keamanan dan ketertiban umum.

Penyelenggaraan hukum dalam suatu pemerintahan sangat menentukan terselenggaranya roda pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari unsur-unsur KKN serta pada gilirannya akan mendorong terlaksananya tugas pemerintahan umum dan pembangunan yang demokratis, adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, supremasi hukum juga harus menjadi cermin sekaligus pagar bagi anggota masyarakat untuk bertingkah laku sesuai etika dan budaya yang sepatutnya. Hal ini berarti hukum harus memberikan rasa kepastian, keadilan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat, baik perlindungan jiwa maupun atas hak-hak yang dimilikinya.

Seperti diketahui, umumnya hukum yang berlaku di suatu daerah terdiri dari hukum yang bersifat nasional dan hukum yang bersifat regional yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Sesuai Undang-Undang No.22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, masalah penegakan hukum khususnya peradilan masih menjadi urusan dan wewenang pemerintah pusat. Ini berarti dalam penegakan hukum khususnya penegakan hukum nasional, pemda sangat tergantung pada kesungguhan aparat penegak hukum pemerintah pusat yang secara langsung hierarkis vertikal diimbangkan kepada aparat penegak hukum yang ditempatkan di daerah-daerah (polisi, hakim, jaksa, dan lain-lain). Sedangkan penegakan peraturan daerah dalam prosesnya dilakukan oleh aparat penegak hukum daerah yang dalam hal ini PPNS di lingkungan pemda yang hanya memiliki kewenangan terbatas, yakni sebagai aparat penyidik pelanggaran perda. Namun disadari atau tidak, bahwa kewibawaan polisi pamong praja sebagai pengemban penegakan hukum pelanggaran perda, belum dapat diharapkan secara optimal.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu, dapat disimpulkan relatif masih belum berjalan dengan baik, konsisten dan konsekuen sehingga masih banyak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta kurang memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang bernilai keadilan.

Tabel : 60
JUMLAH PRODUK HUKUM
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2000-2004

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PRODUK HUKUM				TOTAL
		PERDA	SK Bupati		JUMLAH	
			Bersifat Mengatur	Bersifat Menetapkan		
1	2000	12	19	206	225	237
2	2001	15	40	165	205	220
3	2002	4	26	186	212	216
4	2003	8	13	188	201	209
5	2004	2	23	195	218	220
TOTAL		41	121	940	1.061	1.102

Sumber : Setda Bagian Hukum, Kabupaten Kapuas Hulu 2000-2004

Dari sisi lain, faktor masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum yang berdampak kepada rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki, berpengaruh pula terhadap

meningkatnya tindak pelanggaran maupun kejahatan setiap tahunnya. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini, tentunya menjadi sebuah tantangan pemerintah kedepan dalam mewujudkan pelaksanaan program-program pembangunan yang optimal, karena bagaimanapun juga kondisi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dari seluruh lapisan menjadi modal dasar pembangunan daerah yang pada akhirnya mengangkat pula kondisi perekonomian daerah yang lebih baik dan maju. Penegakan hukum secara tegas yang diikuti dengan peningkatan kesadaran terhadap hukum atau sadar hukum dapat dimulai dari pelaksanaan pemerintahan yang bersih, adil, bijaksana dan berwibawa. Adapun produk hukum yang telah diterbitkan selama periode lima tahun terakhir di Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebanyak 1.102 produk hukum, berupa 41 Peraturan Daerah (Perda) dan 1.061 Surat Keputusan (SK) Bupati, baik yang bersifat mengatur maupun menetapkan.

Sektor atau bidang politik diarahkan pada pemberdayaan potensi sosial politik yang ada dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mewujudkan suasana pemerintahan yang demokratis. Perkembangan situasi politik negara tentunya mewarnai pula perkembangan politik di daerah. Di Kabupaten Kapuas Hulu, keadaan ini ditandai dengan adanya berbagai tuntutan keterbukaan dan kesediaan Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah-langkah kebijaksanaan yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Mekanisme hubungan Pusat dan Daerah yang semula sentralistik dalam pengambilan keputusan, menyebabkan kreatifitas politik pun kurang berkembang. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, setidaknya telah memberikan cukup ruang dan gerak bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan yang lebih sesuai dengan prakarsa serta aspirasi masyarakat yang berkembang.

Kinerja sektor politik dalam periode lima tahun terakhir tersebut adalah dengan ditandainya pelaksanaan Pemilu dan Penghitungan Suara hasil Pemilu Legislatif tanggal 5 April 2004 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 5 Juli 2004 yang dilaksanakan oleh lembaga KPU Daerah Kapuas Hulu yang secara umum berjalan cukup lancar. Adapun jumlah Partai Politik peserta Pemilu yang terdaftar di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah sebanyak 24 partai.

Perkembangan bidang politik di Kabupaten Kapuas Hulu, tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan berbagai partai politik saja, akan tetapi keberadaan Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga turut berpengaruh sebagai penyeimbang kekuatan yang ada di tengah-tengah masyarakat sekaligus sebagai media dan wadah kegiatan pengawasan perpolitikan di daerah. Saat ini terdapat 3 (tiga) organisasi masyarakat yang terdaftar dan melapor secara resmi sejak tahun 2000 hingga periode tahun 2004, yakni Yayasan Peduli Potensi Daerah (LSM-PISIDA), Kelompok Paramuda Kapuas Hulu (KELOPAK) dan Yayasan Lembaga Kerjasama Antar Masyarakat.

E.4. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Setiap usaha pembangunan memerlukan keadaan yang aman dan tertib agar dapat menjamin kelangsungan dan keberhasilan pembangunan. Kondisi ini mutlak harus diciptakan karena merupakan prasyarat dalam pelaksanaan pembangunan. Kebijakan dalam bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat lebih diutamakan pada upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap sumber ancaman melalui upaya-upaya pembinaan, yang tentu saja menjadi tanggung jawab bersama-sama antara masyarakat dan aparat keamanan. Tujuan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat adalah untuk menciptakan iklim yang dapat memberikan suasana yang tertib, aman, tentram dan damai bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas daerah Kapuas Hulu.

Berdasarkan data statistik kriminal di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2003 tercatat jumlah perkara dan terdakwa dalam perkara pidana termasuk pelanggaran lalu lintas, mengalami

kenaikan secara keseluruhan. Peningkatan ini terdata dari jumlah perkara yang diterima pada tahun 2003 sebanyak 484 kasus atau bertambah 87 kasus (naik 21,91%) dari jumlah perkara tahun 2002 sebelumnya yang sebesar 397 kasus. Sedangkan jumlah terdakwa yang masuk juga bertambah sekitar 19,02% dari sebanyak 447 kasus pada tahun 2002 menjadi 532 kasus pada tahun 2003. Sementara dari 484 kasus perkara pidana tersebut, yang telah diselesaikan atau diputuskan adalah sebanyak 388 kasus atau sekitar 80%, dengan jumlah terdakwa yang telah dijatuhi hukuman sebanyak 405 orang atau sekitar 76,13%.

Khususnya pelanggaran lalu lintas, Dinas Kependudukan dan Sosial mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang tahun 2003 adalah sebanyak 465 kasus yang berarti meningkat hingga 55,52% dari 299 kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada tahun 2002. Jenis pelanggaran terbanyak dicatat dari pelanggaran surat-surat kendaraan bermotor yang mencapai 357 kasus. Sedangkan jumlah denda yang diterima dari berbagai pelanggaran lalu lintas pada tahun 2003 tersebut adalah sebesar Rp 12.640.000,- atau naik 70,81% dibanding tahun 2002.

Sementara dari data kecelakaan lalu lintas tahun 2003, tercatat 6 kejadian (turun 3 kejadian dari tahun sebelumnya) dengan kerugian jiwa dan materi berupa: 6 orang meninggal, 3 orang luka berat dan 2 orang luka ringan serta kerugian material sebesar Rp 3.950.000,-